

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx> diakses pada ( 03 April 2020 ).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk – bentuk lainnya dalam rangka untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/> diakses pada ( 03 April 2020 ).

Menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah: “ Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak.

## **2.2 Usaha Bank**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kegiatan usaha yang dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh Bank adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
2. Memberikan kredit,
3. Menerbitkan surat pengakuan utang,
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,

5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga,
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga dan surat berharga,
7. Melakukan kegiatan tempat penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek,
9. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan juga kegiatan wali amanat,
10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh pihak bank sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini dan peraturan Perundang – Undangan yang telah berlaku.

### **2.3 Pengertian Kredit**

Kredit adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan dan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu yang telah di tentukan beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses pada (03 April 2020).

Menurut Undang – Undang No 7 Tahun 1998 Kredit merupakan penyediaan tagihan dan uang yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam yaitu antara pihak bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan peminjam untuk segera melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasilnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk segera melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### **2.4 Fungsi Kredit**

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2004) fungsi kredit bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian,
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat,
- c. Memperlancar arus uang dan arus barang,
- d. Meningkatkan hubungan internasional,
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada,
- f. Meningkatkan daya guna barang,

- g. Meningkatkan gairah berusaha masyarakat,
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan,
- i. Meningkatkan income percapita masyarakat.

Suatu kredit dikatakan mencapai fungsinya, baik bagi kreditur, debitur maupun masyarakat apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengkreditan yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan ekonomi bangsa baik secara mikro maupun secara makro.

Thomas Suyatno, dkk (2007 : 16) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan yaitu:

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

## **2.5 Kategori Kredit Bermasalah**

Bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja timbul dalam

sebuah perjanjian kredit yang telah disepakati, penggolongan atau kategori kredit bermasalah bertujuan untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet> diakses pada ( 03 April 2020 ).

Dengan mengkategorikan kredit yang bermasalah bank dapat dengan mudah melihat dan memberi peringatan kepada nasabah yang melakukan telat bayar dalam memenuhi kewajiban melunasi kreditnya. Dibawah ini adalah penggolongan kualitas kredit yang dibuat oleh bank :

**Tabel 2.1 Kategori Kredit Bermasalah**

<b>Lama Tunggakan/DPD (Hari)</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Keterangan</b>
0	1	Lancar
1 – 90	2	Dalam Perhatian Khusus
91 – 120	3	Kurang Lancar
121 – 180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber: [www.cermati.com](http://www.cermati.com)

Berdasarkan data diatas, maka bisa dikatan bahwa kolektibilitas 3, 4 dan 5 termasuk kedalam kategori kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah Non Performing Loan (NPL). Kategori kredit bermasalah ini juga memiliki manfaat bagi debitur, karena debitur akan dijelaskan mengenai kualitas kredit yang mereka lakukan. Jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran kredit maka debitur akan masuk dalam kategori kredit bermasalah sesuai dengan lama tunggakan/hari debitur yang bersangkutan. Hal lain yang akan terjadi apabila debitur mengalami keterlambatan bayar adalah nama debitur bisa tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang dapat diakses oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan kredit apabila debitur mengajukan pinjaman lagi dimasa yang akan datang dikutip dari [www.cermati.com](http://www.cermati.com) diakses pada (03 April 2020).

## **2.6 Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah**

Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet serta telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Kredit atau Pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggolongkan Bank sebagai Bank yang menghadapi Kredit atau Pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut:

- a. Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam

hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria tersebut.

- b. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PKPBB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.
- c. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Penyelenggaraan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara benar.

Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.



Tahapan prosedur penanganan kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah ini dapat diterapkan dan digunakan sesuai dengan kategori kolektibilitas debitur yang bersangkutan dikutip dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada ( 03 April 2020 ).

## 2.7 Menghindari Terjadinya Kredit Bermasalah

Karena peminat kredit sangat banyak maka bank harus dengan teliti saat melakukan analisa pemberian kredit sampai dengan *dropping* dana, meski memiliki resiko pada dasarnya pemberian kredit bisa berjalan dengan lancar hingga sampai pelunasan berakhir, hal ini tentu saja jika persyaratan pengajuan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hanya beberapa faktor tidak terduga yang berasal dari pihak peminjam saja yang akan memiliki potensi untuk membuat kredit tersebut bermasalah atau macet dikutip dari [www.cermati.com](http://www.cermati.com) diakses pada ( 03 April 2020). Beberapa poin dibawah ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari kredit macet.

### 1. Analisa yang tepat

Hal utama yang wajib untuk dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur adalah melakukan analisa dengan tepat terhadap calon debitur. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat beberapa faktor, seperti: watak atau kepribadian, Kemampuan membayar angsuran, penghasilan, kondisi keuangan debitur, jaminan kredit yang diajukan, prediksi mengenai hambatan, dan kemacetan kredit yang akan diberikan.

## 2. Melakukan pemantauan

Setelah memberikan kredit, maka pihak bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana tersebut, melihat perkembangan usaha dan ekonomi debitur secara langsung.

## 3. Pastikan kondisi jaminan

Jaminan adalah langkah penyelesaian terakhir yang bisa dilakukan oleh kreditur, jika sewaktu-waktu terjadi kredit macet, karena itu sangat penting untuk memastikan kondisi kelayakan dan nilai dari aset yang dijadikan alat jaminan tersebut.

## 4. *Early Warning Signal*

*Early Warning Signal* adalah sistem untuk mendeteksi atau pengenalan terhadap tanda – tanda atau gejala awal yang muncul dan diperkirakan dapat berpotensi mengalami masalah. *Early Warning Signal* dapat di ketahui dengan melihat Kategori Kredit Bermasalah, apabila nasabah sudah ada pada kolektibilitas 3 yang tergolong KL NPL tinggi, maka pihak bank harus mulai memonitoring dan mengawasi nasabah tersebut dengan cara memantau pembayaran setiap bulannya dan memantau perkembangan dari usaha nasabah.